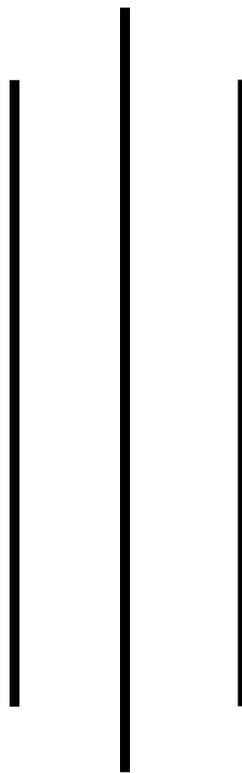




# RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH 2020-2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmatNya penyusunan Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 - 2024 telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program Kerja (Renproja) yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Program Kerja (Renproja) ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN Republik Indonesia dalam mengetahui kondisi di daerah Kalimantan Tengah sehingga kebijakan P4GN di Kalimantan Tengah dalam hal perencanaan dan penganggaran menjadi efisien dan efektif. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 - 2024 ini diucapkan terima kasih.

Kepala BNNP Kalimantan Tengah  
  
Roy Hardi Siahaan, S.IK, S.H, M.H

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. KONDISI UMUM.....	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	21
C. ANALISA SWOT.....	25
<b>BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL .....</b>	<b>29</b>
A. TUJUAN ORGANISASI .....	29
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL .....	30
<b>BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN .....</b>	<b>31</b>
A. RENCANA KINERJA.....	31
B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN .....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>37</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Berikut ini beberapa data terkait permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

#### a. Data kasus tindak pidana narkoba

Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah memiliki data lengkap pengungkapan kasus di BNN Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2014-2021, namun data yang disajikan pada Rencana Program Jangka Menengah BNNP Kalimantan Tengah adalah data tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1 Data Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba BNNP Kalteng  
Tahun 2016 -2020**

DATA	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah Barang Bukti Narkotika</b>	Shabu 563,49 gr Ekstasi 45 butir	Shabu 1491,92 gr	Shabu 5773,37 gr Inex 55 butir	Shabu 7884,89 gr Ekstasi 277 butir	Shabu 5716,57 gr Carisoprodol 400.000 butir
<b>Jumlah Kasus</b>	18 kasus	28 kasus	30 kasus	22 kasus	23 kasus
<b>Jumlah Tersangka</b>	26 orang	31 orang	35 orang	35 orang	25 orang
<b>Sumber Barang</b>	Pontianak Aceh	Banjarbaru Banjarmasin Batam Sampang	Pontianak Tarakan Samarinda Mojokerto Banjarmasin Tarakan	Pontianak Banjarmasin Madura Aceh	Pontianak Katingan Banjarmasin Madura
<b>Wilayah Peredaran</b>	Pangkalanbun Sampit Palangka Raya	Banjarbaru Muara Teweh Palangka Raya Sampit	Pangkalanbun Palangka Raya Sampit	Sampit Palangka Raya Gunung Mas	Sampit Katingan Palangka Raya

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah barang bukti narkoba yang didapatkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini mengindikasikan adanya permintaan yang semakin meningkat dari pengguna narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Jika merujuk pada ungkapan selama 5 tahun tersebut maka narkoba yang paling banyak digunakan di wilayah Kalimantan Tengah adalah shabu.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, terdapat lebih dari 20 (dua puluh) kasus dan tersangka yang terungkap setiap tahunnya oleh BNNP Kalimantan Tengah. Menjadi pengedar atau kurir narkoba telah menjadi mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi banyak orang.

Hampir setiap tahun wilayah Palangka Raya, Sampit dan Pangkalan Bun menjadi sasaran peredaran narkoba. Hal ini dapat dipahami karena ketiga wilayah tersebut termasuk kabupaten/kota yang paling padat penduduknya di Kalimantan Tengah. Apalagi terdapat pelabuhan udara di ketiga wilayah tersebut yang menjadi jalur masuk narkoba melalui udara. Pangkalanbun dan Sampit memiliki pelabuhan laut sehingga menjadi jalur peredaran narkoba melalui laut. Saat ini BNNK di Kalimantan Tengah hanya 2 (dua) yaitu BNNK Palangka Raya dan BNNK Kotawaringin Barat (Pangkalanbun). Sehingga untuk ke depannya dapat segera diusulkan pendirian BNNK Kotawaringin Timur di Sampit.

- b. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary.

**Tabel 1.2 Data Penyalahguna Narkoba Voluntary Tahun 2016-2020**

Satker	Jumlah (orang)				
	2016	2017	2018	2019	2020
BNN Provinsi Kalimantan Tengah	83	176	88	87	46
BNN Kota Palangka Raya	-	-	-	16	17
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	7	8	8	2	16
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>184</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>79</b>

Kondisi pandemi pada tahun 2020 menyebabkan penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dan inovasi dari Bidang Rehabilitasi khususnya agar penyalah guna tetap dapat terlayani tanpa mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Penggunaan teknologi dapat menjadi alternative bagi konsultasi online pada penyalahguna.

c. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, BNNP Kalimantan Tengah telah melakukan kerjasama dengan beberapa LRIP dan LRKM dalam hal perjanjian kerjasama, peningkatan kemampuan maupun dalam layanan rehabilitasi.

BNNP Kalimantan Tengah melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dalam hal peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi. Hal ini dilakukan hampir setiap tahun untuk mendukung pelayanan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dalam merehabilitasi klien penyalah guna narkoba. Dukungan ini dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan petugas rehabilitasi.

**Tabel 1.3 Data LRIP yang Mendapat Peningkatan Kemampuan dari BNNP Kalimantan Tengah**

No	Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Tahun						Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	RSUD dr. DORIS SYLVANUS P. RAYA	√	-	-	√	-	-	Tahun 2016: Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Instansi Pemerintah Bidang 'Motivational Interviewing'
2	RSUD KOTA PALANGKA RAYA	-	-	-	√	√	√	
3	RSJD KALAWA ATEI	√	-	-	-	-	√	
4	PUSKESMAS MENTENG	-	√	-	√	-	-	Tahun 2017: Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Pelatihan Asesmen
5	PUSKESMAS KERENG BANGKIRAI	-	-	-	-	-	√	
6	PUSKESMAS PANARUNG	-	√	-	√	√	-	Tahun 2019: Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Pengetahuan Dasar Adiksi
7	PUSKESMAS PAHANDUT	-	-	-	√	√	-	
8	PUSKESMAS AMPAH	-	-	-	√	-	-	
9	DINAS SOSIAL PROV. KALTENG	-	-	-	-	√	-	Tahun 2020-2021: Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Asesmen dan Rencana Terapi (UTC 5)
10	BAPAS KELAS I PALANGKA RAYA	-	-	-	-	√	-	
11	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	-	-	-	-	√	-	
12	RSUD MAS AMSYAR KASONGAN	√	√	-	√	-	√	

13	RSUD dr. MURJANI SAMPIT	√	-	-	√	-	√	<p><b>Tahun 2016:</b> Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Instansi Pemerintah Bidang <i>Motivational Interviewing</i>'</p> <p><b>Tahun 2017:</b> Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Pelatihan Asesmen</p> <p><b>Tahun 2019:</b> Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Pengetahuan Dasar Adiksi</p> <p><b>Tahun 2020-2021:</b> Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Asesmen dan Rencana Terapi (UTC 5)</p>
14	RSUD KUALA PEMBUANG	√	-	-	√	√	√	
15	RSUD SULTAN IMMANUDIN P. BUN	√	-	-	-	-	√	
16	RSUD PULANG PISAU	√	√	-	√	√	√	
17	RSUD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS	√	√	-	√	-	√	
18	RSUD JARAGA SASAMEH BUNTOK	√	-	-	-	-	√	
19	RSUD TAMIANG LAYANG	√	-	-	-	-	√	
20	RSUD MUARA TEWEH	√	-	-	-	√	-	
21	RSUD KUALA KURUN	-	√	-	-	√	-	
22	RSUD PURUK CAHU	√	-	-	-	√	-	
23	RSUD LAMANDAU	√	-	-	√	-	√	
24	RSUD SUKAMARA	√	√	-	√	-	√	
25	RS BHAYANGKARA	√	-	-	-	-	-	
26	PUSKESMAS MADUREJO KAB. KOBAR	-	√	-	-	-	-	
27	PUSKESMAS KUMAI KAB. KOBAR	-	√	-	-	-	-	
28	PUSKESMAS AMPAH KAB. BARTIM	-	√	-	-	-	-	
29	RSUD HANAU	-	√	-	-	-	-	

**Tabel 1.4 LRKM yang Mendapat Peningkatan Kemampuan dari BNNP Kalimantan Tengah**

No	Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Tahun						Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	YAYASAN GALILEA	-	-	-	-	√	-	Tahun 2020-2021: Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi Melalui Asesmen dan Rencana Terapi (UTC 5)
2	YAYASAN HUMA HAWA OASIS	-	-	-	-	√	-	
3	YAYASAN AUBAH TRAINING CENTER SAMPIT	-	-	-	-	√	-	

Fasilitas dan sumber daya BNNP Kalimantan Tengah sangat terbatas terutama dalam memberikan layanan rehab yang cakupannya seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang sangat luas. Sehingga sejak tahun 2018 dilakukan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai fasilitas kesehatan instansi pemerintah dan komponen masyarakat.

**Tabel 1.5 LRIP yang Melakukan PKS dengan BNNP Kalimantan Tengah**

No	DAFTAR LEMBAGA	TAHUN		
		2019	2020	2021
1.	RSUD KOTA PALANGKA RAYA	-	-	√
2	RSJD KALAWA ATEI	-	-	√
3	PUSKESMAS PANARUNG	-	-	√
4	PUSKESMAS MENTENG	-	-	√
5	PUSKESMAS KERENG BANGKIRAI	-	-	√
6	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	-	√	√
7	RSUD PULANG PISAU	-	-	√
8	RSUD JARAGA SASAMEH BUNTOK	-	-	√

9	RSUD dr. SOEMARNO SOSROATMODJO KAPUAS	√	-	√
10	RSUD KUALA PEMBUANG	-	√	√
11	RSUD MUARA TEWEH	-	√	√
12	RSUD MAS AMSYAR KASONGAN	-	√	√
13	RSUD LAMANDAU	-	-	√
14	RSUD SUKAMARA	-	-	√
15	RSUD dr. MURJANI SAMPIT	-	-	√
16	RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN	-	-	√
17	RSUD TAMIANG LAYANG	-	-	√
18	RSUD KUALA KURUN	-	-	√

**Tabel 1.6 LRKM yang Melakukan PKS dengan BNNP Kalimantan Tengah**

No	DAFTAR LEMBAGA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1.	YAYASAN HUMA HAWA OASIS	-	-	√	√
2	YAYASAN GALILEA	-	-	√	√
3	YAYASAN AL-IKHLAS	-	-	√	√
4	YAYASAN PONDOK DARUS SALAM SAMPIT/ YAYASAN AUBAH TRAINING CENTRE	-	-	√	√
5	RS CITRA HUSADA	√	√	-	√

**Tabel 1.7 Organisasi Perangkat Daerah yang Melakukan PKS  
dengan BNNP Kalimantan Tengah**

No	DAFTAR INSTANSI	TAHUN	
		2020	2021
1.	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG	√	√
2	KPU PROVINSI KALTENG	√	-
3	PEMKAB BARITO UTARA	-	√
4	PEMKAB KOTAWARINGIN TIMUR	-	√
5	PEMKAB KATINGAN	-	√
6	PT. MITRA TATA LINGKUNGAN BARU	√	-
7	PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA	-	√

d. Data fasilitas IPWL

Fasilitas Institusi Penerima Wajib Laport di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 :

**Tabel 1.8 Institusi Penerima Wajib Laport di Kalimantan Tengah**

No	Institusi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1.	RS Bhayangkara	√	-
2.	RSJ Kalawa Atei	√	-
3.	Klinik Bidokkes Polda Kalteng	√	-
4.	Klinik Pratama Uras Barigas BNNP Kalteng	√	-

- 1) RS Bhayangkara Tk. IV Palangkaraya  
Melayani rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Berlokasi di Jl. Hj.Ikap No.1, Langkai, Pahandut, Palangka Raya.
- 2) RSJ Kalawa Atei  
Melayani rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Berlokasi di Jl. Palangka Raya, Kuala Kurun, Bukit Rawi, Pulang Pisau.
- 3) Klinik Bidokkes Polda Kalimantan Tengah  
Melayani rehabilitasi rawat jalan. Berlokasi di Jl. Tjilik Riwut, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya.
- 4) Klinik Pratama Uras Barigas BNNP Kalimantan Tengah  
Melayani rehabilitasi rawat jalan. Berlokasi di Jl. Tangkasiang No. 12, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.  
Klinik Pratama Berkah BNNK Palangka Raya dan Klinik Pratama BNN Kotawaringin Barat sedang dalam pengajuan oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI untuk menjadi IPWL.  
Sedangkan Institusi Penerima Wajib Lapor Kementerian Sosial (Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 43/HUK/2020 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) adalah Yayasan Galilea. Lembaga ini melayani rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap social. Berlokasi di Jl. Tjilik Riwut KM.18, Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya.

e. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.

Penyalah guna narkoba yang dilayani oleh BNNP Kalimantan Tengah terdiri atas tiga jenis, yakni :

a. Klien voluntary

Voluntary adalah klien yang datang dengan kesadaran sendiri atau mendapat dorongan dari keluarga

b. Klien compulsory

Klien compulsory biasanya rujukan dari polda/polres yang tertangkap waktu razia dan tidak mempunyai barang bukti dan perlu dilakukan asesmen dengan hasil urine +.

- c. Klien TAT TAT (Tim Asesmen Terpadu) adalah tangkapan dari polisi yang memiliki barang bukti di bawah SEMA dan diajukan untuk dilakukan asesmen medis maupun hukum. Ini untuk melihat apakah dia terlibat jaringan ataukah murni penyalahguna yang perlu direhab. Timnya berasal dari bnn, kejaksaan, dan polda.

**Tabel 1.9 Penyalahguna Narkoba yang Dilayani BNNP Kalimantan Tengah**

Satker	JUMLAH															Tot
	2016			2017			2018			2019			2020			
	V	C	T	V	C	T	V	C	T	V	C	T	V	C	T	
BNN Provinsi Kalimantan Tengah	83	138	-	176	62	16	88	41	24	87	29	7	46	60	5	862
BNN Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	26	10	17	23	-	92
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	7	29	-	8	18	2	8	27	4	2	37	-	16	5	1	164
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>184</b>	<b>80</b>	<b>18</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>6</b>	<b>1.118</b>

Keterangan :

V : voluntary

C : compulsory

T : Tim Asesmen Terpadu

- f. Data penghuni lapas kasus penyalahgunaan narkoba.

Berikut data penyalah guna dan pengedar narkoba di Kalimantan Tengah selama dua tahun.

Tabel 1.10 Rekapitulasi Jumlah Penghuni Khusus di Lapas dan Rutan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

NO	UPT	BANDAR/ PENGEDAR		PENGGUNA	
		2020	2021	2020	2021
1	Lapas Kelas II A Palangka Raya	-	346	356	-
2	Lapas Kelas II B Muara Teweh	114	118	1	3
3	Lapas Kelas II B Pangkalan Bun	150	257	166	59
4	Lapas Kelas II Sampit	480	522	-	9
5	Lapas Kelas II Sukamara	-	8	4	2
6	Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan	264	473	1	28
7	Lapas Perempuan Kelas II A Palangka Raya	90	39	29	3
8	Lembaga Pembinaan Kasus Anak Kelas II Palangka Raya	5	3	-	1
9	Rutan Kelas II A Palangka Raya	346	176	-	2
10	Rutan Kelas II B Buntok	-	95	1	10
11	Rutan Kelas II B Kuala Kapuas	77	77	1	1
12	Rutan Kelas II B Tamiang Layang	125	112	-	5
	JUMLAH	1651	2226	651	123

Selama dua tahun terakhir, jumlah bandar/pengedar yang dihukum di lapas dan rutan di Kalimantan Tengah bertambah secara signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 1651 pengedar yang ditahan, sementara pada tahun 2021 bertambah menjadi 2226 pengedar. Pada periode yang sama terjadi peningkatan sebesar 34%. Ini peningkatan yang sangat besar.

Sementara jumlah pengguna dalam periode yang sama berkurang angkanya dari 651 orang menjadi 123 orang. Pengurangan sebesar 528 orang mengindikasikan jumlah pengguna yang tertangkap memang berkurang/bebas.

- g. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah, perguruan tinggi, dll.
- Luas Wilayah Daratan : 153.564,5 Km<sup>2</sup>
  - Jumlah Penduduk : Laki Laki = 1.420.300 Jiwa  
Perempuan = 1.294.600 Jiwa
  - Jumlah Kabupaten/Kota : 13 Kabupaten dan 1 Kota
  - Jumlah Fasilitas Kesehatan :
    - 26 Rumah Sakit Umum
    - 2 Rumah Sakit Khusus

- 1 Rumah Sakit Bersalin
- 76 Puskesmas Rawat Inap
- 127 Puskesmas Rawat Jalan
- 153 Klinik Pratama
- 3.478 Posyandu
- Jumlah Sarana Pendidikan :
  - SD : 1.553
  - SMP : 792
  - SMA : 277
  - SMK : 117
  - Perguruan Tinggi : 20

Keberadaan fasilitas kesehatan yang cukup banyak di wilayah provinsi Kalimantan Tengah sangat berpeluang menjadi mitra BNNP Kalimantan Tengah dalam mendukung kegiatan rehabilitasi. Sejak tahun 2019 BNNP Kalimantan Tengah melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa rumah sakit di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Sekolah menengah dan perguruan tinggi menjadi sasaran kampanye dan sosialisasi P4GN dari BNNP Kalimantan Tengah. Menurut penelitian, penyalahguna narkoba mengenal narkoba pada usia belasan dan menjadi pengguna kebanyakan pada saat telah memiliki penghasilan sendiri. Sehingga, sangatlah penting membentengi para pelajar dan mahasiswa sehingga tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba.

- h. Data SDM BNN di wilayah Provinsi (Termasuk BNN Kabupaten/Kota, jumlah dan kategorinya).

BNNP Kalimantan Tengah sebagai perwakilan BNN di Kalimantan Tengah memiliki tugas menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini kinerja BNNP Kalimantan Tengah didukung oleh keberadaan BNNK Palangka Raya dan BNNK Kotawaringin Barat. Secara keseluruhan ini kurang memadai mengingat terdapat 12 kabupaten lagi yang belum memiliki BNNK.

**Tabel 1.11 Data Pegawai BNNP Kalimantan Tengah  
Per 31 Agustus 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP/NRP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>STATUS KEPEG</b>
1	Roy Hardi Siahaan, S.IK, S.H, M.H 70020374	KEPALA BNNP KALTENG	BRIGJEN POL / IV-D	PENUGASAN
2	Dr. AGUSTIYANTO, SH, M.Si 66050655	KABID PEMBERANTASAN	KOMBES POL / IV-C	PENUGASAN
3	Drs. M. SOEJA'I 19621220 199003 1 005	PENYULUH NARKOBA AHLI MADYA	PEMBINA TK.I / IV-B	ORGANIK
4	DORCE SANDA, SKM., MPH. 19710621 199403 2 004	KONSELOR ADIKSI AHLI MADYA	PEMBINA TK.I / IV-B	ORGANIK
5	BINTARI RAHAYU, S.P. 19740822 199903 2 005	KABAG UMUM	PEMBINA / IV-A	ORGANIK
6	JALMO HADI PRAYITNO, SE. 73110628	KASI PENYIDIKAN	KOMPOL / IV-A	PENUGASAN
7	ABD.KADIR, SKM 19760710 201001 1 019	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA	PENATA TK. I / III-D	ORGANIK
8	ALPHAOMEGA PULCHERIMA RAMBANG, ST 19850107 201001 2 007	PERENCANA AHLI MUDA	PENATA TK. I / III-D	ORGANIK
9	ERYSTINA LELUNI LISWANTI, S.E., M.E 19860420 200904 2 002	KASI WASTAHTI	PENATA TK. I / III-D	ORGANIK
10	SUBANDI, SP. 19641229 198903 1 013	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA	PENATA TK. I / III-D	ORGANIK
11	dr. NADYA NORMALIA MULIANSYAH 19861119 201502 2 001	KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA	PENATA / III-C	ORGANIK
12	DWI PRAWITARINI SOEDIJARDJO, SE. 19750804 201212 2 001	PENGOLAH DATA SIE DAYAMAS	PENATA / III-C	ORGANIK
13	JONATHAN REINER, ST 19760628 200903 1 001	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
14	WAHYUDI, SKM 19910727 201403 1 002	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
15	NUZUL ILHAMSyah, S.Kom. 19850822 201212 1 002	PENYIDIK PRATAMA	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
16	ANDHIKA PATRIOTA PUTRANAWAN, S.Psi. 19910309 201502 1 004	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
17	ARFIAN HENDRA WARDANA, HS, SE. 19840326 201502 1 001	PERENCANA AHLI PERTAMA	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
18	AGUS SRI MUJIYONO, SH. 19801120 201403 1 001	PENYIDIK PRATAMA	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
19	RISKA APRILLIA YUNARTH0, M.Psi 19930406 201902 2 006	PSIKOLOG KLINIS SIE PENGUATAN LR	PENATA MUDA Tk. I / III-B	ORGANIK
20	ARTRIAN SONY, A.Md 19790424 201001 1 015	PENGOLAH DATA SIE CEGAH BIDANG P2M	PENATA MUDA / III-A	ORGANIK
21	RIO SANDY SIRAIT, SH 19880703 201801 1 001	PENYIDIK BNN AHLI PRATAMA	PENATA MUDA / III-A	ORGANIK

22	DINA AULIA RAMADANI, SE 19900409 202012 2 005	ANALIS ASET NEGARA SIE WASTAHTI	PENATA MUDA / III-A	CPNS
23	ASTRID SWANDIRA BALKIS, P.Si 19931016 202012 2 004	KONSELOR SIE PASCAREHAB	PENATA MUDA / III-A	CPNS
24	RIFIQI ALWAFI PUTRA NUSANTARA, S.Psi 19940325 202012 1 006	KONSELOR SIE PENGUATAN LR	PENATA MUDA / III-A	CPNS
25	BAYU PRATAMA, SKM 19960322 202012 1 008	KONSELOR SIE PASCAREHAB	PENATA MUDA / III-A	CPNS
26	DWI IRMA YUNIARTI, S.Psi 19970606 202012 2 006	KONSELOR SIE PENGUATAN LR	PENATA MUDA / III-A	CPNS
27	PURWANTORO, SH. 78120038	PENYIDIK PRATAMA	AIPTU / II-F	PENUGASAN
28	ANDRI FIRMANSYAH, A.M.K. 19900428 201403 1 003	PERAWAT SIE PENGUATAN LR	PENGATUR Tk. I / II-D	ORGANIK
29	PURWANTINA ALISA, A.M.K. 19910803 201403 2 007	PERAWAT SIE WASTAHTI	PENGATUR Tk. I / II-D	ORGANIK
30	NUR ALIFAH, AMKL 19921028 201403 2 001	PENGOLAH DATA SUBBAG ADMINISTRASI	PENGATUR Tk. I / II-D	ORGANIK
31	TINA YULIAWATI, A.Md. 19900712 201502 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN SUBBAG ADMINISTRASI	PENGATUR Tk. I / II-D	ORGANIK
32	RUANDO SIBURIAN, A.Md 19820829 201503 1 003	PENGOLAH DATA SUBBAG ADMINISTRASI	PENGATUR Tk. I / II-D	ORGANIK
33	LELY A. SIREGAR, SH 86041103	PENYIDIK PRATAMA	BRIPKA / II-D	PENUGASAN
34	PENYANG SAPUTRA, SH 87100289	PENGADMINISTRASI UMUM SIE WASTAHTI	BRIPKA / II-D	PENUGASAN
35	RISALDY SYAHRIR, SE. 83011235	PENGADMINISTRASI UMUM SIE WASTAHTI	BRIPKA / II-D	PENUGASAN
36	SUGIANSYAH 86040573	PENYIDIK PRATAMA BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPKA / II-D	PENUGASAN
37	ABDUL RAHMAN, SH 89040789	PENYIDIK PRATAMA	BRIGPOL / II-C	PENUGASAN
38	MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos 91060380	ANALIS INTELIJEN TAKTIS PRATAMA	BRIPTU/ II-B	PENUGASAN
39	UNDY PAMBUDI, S.Pd. 92110891	PENGOLAH DATA SEKSI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPTU / II-B	PENUGASAN
40	BENNY GUNAWAN 96010060	PENGOLAH DATA SEKSI PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPTU / II-B	PENUGASAN
41	SYARIFUDIN 99090538	PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPDA / II-A	PENUGASAN
42	SARWANI ABDAN 19950206 202012 1 007	PENJAGA TAHANAN	PENGATUR MUDA / II-A	CPNS
43	PERDI EFENDI KAMIN 19970612 202012 1 005	PENJAGA TAHANAN	PENGATUR MUDA / II-A	CPNS

44	ALI SUBKHAN	PPNPN	-	
45	BASITH	PPNPN	-	
46	MUHAMMAD ANWAR, S.Pd.	PPNPN	-	
47	HIDAYAT	PPNPN	-	
48	NOVALINA	PPNPN	-	
49	ARIS RIYADI, S.T.	PPNPN	-	
50	DONNY CHRISTIANTO S., S.H.	PPNPN	-	
51	RAYMOND ALBERTO BRIANTORO	PPNPN	-	
52	ODI PRAYOGA	PPNPN	-	
53	MUHAMMAD WAHYU ILLAHI, S.Pd.	PPNPN	-	
54	YUDI PRASITIYO, A.md., Ak.	PPNPN	-	
55	MUHAMMAD NUR	PPNPN	-	
56	MIRANDA	PPNPN	-	
57	MUHAMMAD ZAINI GHANI, S.Pd.	PPNPN	-	
58	SAPRIANSAH	PPNPN	-	
59	FARID AZHAR RACHMAN, S.T.	PPNPN	-	
60	I KADEK ADI WIRATAMA, S.Pd.	PPNPN	-	
61	ALBITA, S.Kep., Ners.	PPNPN	-	
62	Apt. SIGIT WIGUNA, S.Farm.	PPNPN	-	
63	JAMES PARDOMUAN SIMANJUNTAK, S.Kep., Ners.	PPNPN	-	

Tabel 1.11. Data Pegawai BNNP Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	SATKER	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	BNNP KALIMANTAN TENGAH	46	17	63
2.	BNN KOTA PALANGKA RAYA	16	13	29
3.	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	14	4	18
<b>JUMLAH</b>		<b>76</b>	<b>34</b>	<b>110</b>

Dari keseluruhan jumlah pegawai BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran, 69,09 % adalah laki-laki dan 30,91 % adalah perempuan.

Tabel 1.12. Data Pegawai BNNP Kalimantan Tengah Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	SATKER	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		PNS	POLRI	PPNPN	
1.	BNNP KALIMANTAN TENGAH	30	13	20	63
2.	BNN KOTA PALANGKA RAYA	12	3	14	29
3.	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	7	2	9	18
<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>110</b>

Dari keseluruhan pegawai BNNP Kalimantan Tengah yang berjumlah 110 orang, status kepegawaiannya 44,54% adalah PNS 16,36% adalah penugasan Polri dan 39,09 %nya adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Tabel 1.12. Data PNS dan Polri di BNNP Kalteng Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	SATKER	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1.	BNNP KALIMANTAN TENGAH	5	6	27	4	1	43
2.	BNN KOTA PALANGKA RAYA	1	3	11	-	-	15
3.	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	1	1	7	-	-	9
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>67</b>

Pada saat terdapat 67 PNS dan penugasan Polri di BNNP Kalimantan Tengah dengan tingkat pendidikan bervariasi di antaranya 10,44 % lulusan SMA, 14,92% lulusan D3, 67,16% lulusan S1, 5,97% lulusan S2 dan 1,49% lulusan S3.

Tabel 1.13. Data PNS dan Polri di BNNP Kalteng Berdasarkan Golongan

NO	SATKER	GOLONGAN			JUMLAH
		IV	III	II	
2.	BNNP KALIMANTAN TENGAH	6	20	17	43
3.	BNN KOTA PALANGKA RAYA	1	8	6	15
4.	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	1	6	2	9
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>67</b>

- i. Data sarana prasarana perkantoran (gedung kantor milik sendiri, sewa atau pinjam pakai).

Gedung perkantoran BNNP Kalimantan Tengah terletak Jl. Tangkasiang No.12, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan berstatus dengan status gedung dan tanah milik sendiri. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.14. Prasarana Perkantoran BNNP Kalimantan Tengah**

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	5.649.099.000
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit	283.683.000
3	Bangunan Tempat Parkir	1 unit	168.902.00

Berdasarkan aplikasi SIMAK sampai dengan bulan Juli 2021, BNNP Kalimantan Tengah memiliki aset sebanyak 933 Unit dengan Nilai Aset BMN sebesar Rp. 15.136.360.393,-

- j. Sarana klinik BNNP Kalimantan Tengah

Klinik Pratama BNNP Kalimantan Tengah beroperasi dengan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan nomor Izin : 503.3/08/DPM-PTSP/IOK/VIII/2020. Izin operasional klinik berlaku mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2025.

Sarana Klinik Rehabilitasi secara umum adalah :

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan dan Screening
2. Tempat Asesmen dan Konseling
3. Tempat Perawatan
4. Tempat Administrasi
5. Sanitasi
6. Listrik
7. Tata Udara
8. Pencahayaan
9. WC
10. Wastafel

Beberapa peralatan pemeriksaan fisik dasar yang terdapat di klinik adalah: Tensimeter, termometer, timbangan berat badan dan tinggi badan, stetoskop.

**Tabel 1.15 Prasarana Klinik**

No	Item	Jumlah
1.	Meja Pemeriksaan Kesehatan dan Screening	1
2.	Meja Asesment dan Konseling	2
3.	Meja Administrasi	4
4.	Kursi	12
5.	Lemari Obat	2
6.	Lemari Arsip	3
7.	Bed Pasien	1
8.	Tabung Oksigen Kecil	1
9.	Lemari Pendingin	1
10.	Komputer	2
11.	Printer	3
12.	Laptop	2
13.	Air Conditioner (AC)	2

**Tabel 1.16 Daftar Pegawai Klinik Pratama BNNP Kalteng**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	dr. Ida Yosopa	Penanggung Jawab	Non PNS (Dokter RS Betang Pabelum Kota Palangka Raya)
2.	dr. Valencia Wilentine	Dokter	PNS (Dokter Labkesda Provinsi Kalteng)
3.	Dorce Sanda, SKM, MPH	Konselor Adiksi Ahli Madya Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS
4.	Riska Aprillia Y, M.Psi	Psikolog Klinis Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS

5.	Andri Firmansyah, AMK	Perawat Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS
6.	Rifqi Alwafi P, N, S.Psi	Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS
7.	Dwi Irma Yuniarti, S.Psi	Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS
8.	Bayu Pratama, SKM	Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS
9.	Astrid Swandira B, S.Psi	Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PNS
10.	Apt. Sigit Wiguna, S.farm	Apoteker Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PPNPN
11.	Albita, S.Kep, Ns	Perawat Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PPNPN
12.	James Pardomuan Simanjuntak, S.Kep, Ns	Perawat Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PPNPN
13.	I Kadek Ady Wiratama, S.Pd	Staff Admin Bidang Rehabilitasi BNNP Kalteng	PPNPN

Sumber daya manusia klinik rehab terdiri atas tenaga medis (dokter, perawat dan apoteker) dan tenaga penunjang (konselor Adiksi Ahli Madya Bidang Rehabilitasi, Konselor Bidang Rehabilitasi, Psikolog Klinis Bidang Rehabilitasi dan Staff Administrasi Bidang Rehabilitasi). Keberadaan dokter di klinik sangat penting karena merupakan salah satu syarat dikeluarkannya izin operasional klinik. Sayangnya, saat ini tenaga dokter yang ada di Klinik Pratama BNNP Kalimantan Tengah bukan merupakan pegawai BNNP Kalimantan Tengah sehingga untuk kedepannya perlu diadakan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter.

k. Senjata api; dll

Dukungan senjata api yang ada di BNNP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17 Data Senjata Api

No	Jenis	Jumlah	Nilai Total
1.	Pistol	11	240.608.500
2.	Senapan Semi Otomatis	5	144.625.000
3.	Senjata Bahu	5	311.830.000

I. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya.

Penetapan Kinerja BNNP Kalteng tahun 2020 menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 12 (dua belas) indikator. Berikut ini realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2020, serta penjelasan hasil capaian 12 (dua belas) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.18 Capaian Kinerja BNNP Kalteng Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	7 institusi/ lembaga	10 institusi/ lembaga	142.85 %
2	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	1 kawasan/ wilayah	1 kawasan / wilayah	100.00 %
3	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	33,44 %	477.71 %

4	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan	2 Jaringan	200.00 %
5	Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	40 Orang	49 Orang	122.50 %
6	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	24 Instansi/ Lingkungan	24 Instansi/ Lingkungan	100.00 %
7	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100.00 %
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika	100	100	100.00 %
8	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah	6 Fasilitas	7 Fasilitas	116.00 %
9	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang operasional	4 Fasilitas	2 Fasilitas	50.00 %
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P21	12 Berkas	23 Berkas	191.67 %

11	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	88.52	100.59 %
----	--	----------------------------	----	-------	----------

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

#### a. Sumber Daya Alam

Ekonomi Kalimantan Tengah masih bergantung pada sumber daya alam atau SDA. utamanya oleh perkebunan dan industri kelapa sawit yang memiliki pangsa 36%, dan pertambangan batu bara yang memiliki pangsa 12% terhadap perekonomian Kalteng. Masih terkonsentrasinya ekonomi Kalteng terhadap SDA juga nampak dari komposisi modal asing yang masih didominasi pertambangan untuk modal asing, dan pertanian/perkebunan kelapa sawit untuk modal domestik. Sementara kepemilikan perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit yang umumnya dimiliki pengusaha domestik menjadi penyebab besarnya andil modal domestik dalam perkebunan kelapa sawit

Kalimantan Tengah kaya akan hasil mineral, seperti emas, batu bara, dan bauksit. Pertambangan emas telah lama menjadi sumber penghasilan bagi penduduk setempat maupun pendatang. Tapi, perkembangan pesat dari pertambangan emas ilegal, dalam beberapa tahun ke belakang, telah menyebabkan peningkatan kandungan merkuri di beberapa sungai. Cadangan batu bara besar telah ditemukan di Sungai Barito dan bagian hulu Sungai Kahayan serta Sungai Kapuas, termasuk cadangan batu bara keras yang digunakan untuk produksi logam besi. Kalimantan Tengah adalah wilayah dengan peluang eksploitasi batu bara yang sangat menarik. Industri ini bisa berkembang cepat saat dibukanya tempat penggalian dan perbaikan sistem transportasi. Kontribusi 14 kabupaten dan kota atas PDRB cenderung beragam. Ada tiga kabupaten, yaitu Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur yang menyumbang sekitar 45% dari ekonomi provinsi. Sebagian besar berasal dari kelapa sawit, serta produksi dan pengolahan karet.

Transportasi dan infrastruktur logistik memainkan peranan penting untuk perkembangan ekonomi di provinsi ini. Sungai tetap menjadi jalur transportasi utama karena kebanyakan kota dan desa terletak di tepian sungai-sungai besar. Perluasan jaringan jalan berlangsung relatif lambat karena sulitnya konstruksi jalan dan perawatannya. Kendala ini diakibatkan oleh kontur tanah yang sebagian besar berupa rawa dan sungai. Jalan Trans Kalimantan baru saja selesai dibangun.

b. Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya, terletak antara 0°45' Lintang Utara s.d. 3°30' Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km<sup>2</sup>. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700 km.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 59,52 % per tahun, dimana kondisi udara relatif cukup panas yaitu mencapai 34,9°C. Sementara rata-rata curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 2.808,86 mm.

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Tengah yang semula terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota, dimekarkan menjadi beberapa 13 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

- 1). Kota Palangka Raya dengan ibukota Palangka Raya.
- 2). Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun.
- 3). Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukota Sampit.
- 4). Kabupaten Kapuas dengan ibukota Kuala Kapuas.
- 5). Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota Buntok.
- 6). Kabupaten Barito Utara dengan ibukota Muara Teweh.
- 7). Kabupaten Lamandau dengan ibukota Nanga Bulik.
- 8). Kabupaten Sukamara dengan ibukota Sukamara.
- 9). Kabupaten Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang.
- 10). Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan.
- 11). Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun.
- 12). Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau.
- 13). Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang.
- 14). Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu.

c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2020, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebanyak 2.714.900 jiwa. Jumlah penduduk berusia produktif 15-64 tahun sebanyak 1.887.500 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas laki-laki sebanyak 1.420.300 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.294.600 jiwa.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Kalimantan Tengah adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Pemerintah Daerah belum menjadikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai program prioritas
- b. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 153.564 Km<sup>2</sup> merupakan tantangan tersendiri bagi BNNP Kalimantan Tengah untuk

menjangkau setiap kabupaten yang ada, apalagi jarak dari ibukota provinsi ke ibukota kabupaten sangat jauh.

Tabel 1.19 Jarak ke Ibukota Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng

No	Kabupaten/Kota	Jarak ke Ibukota Provinsi (km)
1.	Kotawaringin Barat	449
2.	Kotawaringin Timur	227
3.	Kapuas	142
4.	Barito Selatan	183
5.	Barito Utara	326
6.	Sukamara	686
7.	Lamandau	559
8.	Seruyan	457
9.	Katingan	88
10.	Pulang Pisau	98
11.	Gunung Mas	180
12.	Barito Timur	276
13.	Murung Raya	411
14.	Palangka Raya	-

Jarak yang jauh ke tiap kabupaten berakibat pada biaya transportasi yang tinggi sehingga untuk menjangkau tiap kabupaten diperlukan biaya yang besar untuk perjalanan dinas, sementara anggaran perjalanan dinas terbatas.

#### c. Kurangnya SDM

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan adalah kurangnya sumber daya manusia di BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran.

## C.ANALISA SWOT

Sebagai strategi penentu masa depan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya maka dilakukan analisa SWOT pada kondisi BNNP Kalimantan Tengah saat ini. Selain untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari BNNP Kalimantan Tengah saat ini, penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan dalam mendukung pelaksanaan programnya.

### *Strength* (Kekuatan)

#### 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 mewajibkan semua Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah berperan serta secara mandiri menyusun rencana aksi dan melaksanakan kegiatan P4GN. Ini merupakan landasan hukum kuat bagi BNNP Kalimantan Tengah mendorong keterlibatan dan peran aktif kepala daerah dalam melaksanakan rencana aksi P4GN. BNNP Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan terutama Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Tengah.

#### 2. Latar belakang pegawai BNNP Kalimantan Tengah

Pegawai Kalimantan Tengah berlatar belakang PNS dan Polri. PNS BNNP Kalimantan Tengah ada yang berasal dari pegawai Pemda. Aneka latar belakang yang berbeda ini tentunya menjadi kekuatan dalam bekerja sama ke depannya dengan berbagai institusi karena :

- Mantan pegawai Pemda yang bekerja di BNNP mengetahui aturan birokrasi di pemerintah daerah sehingga memudahkan melakukan kerja sama
- Polri yang ditugaskan di BNNP Kalimantan Tengah memiliki pengetahuan tentang hukum dan dapat memudahkan kerja sama dengan Polri

### *Weakness* (Kelemahan)

#### 1. Kekurangan personel

Pada saat ini jumlah pegawai BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran yang hanya berjumlah 110 orang tentu kurang memadai mengingat wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas. Beberapa pegawai BNNP Kalimantan Tengah saat ini mempunyai tugas rangkap.

#### 2. Keterbatasan anggaran

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas otomatis mengakibatkan transportasi ke daerah memakan biaya yang sangat besar sementara pagu anggaran untuk koordinasi kelembagaan sangat terbatas. Hal ini mengurangi kemampuan akselerasi BNNP Kalimantan Tengah ke kabupaten yang jaraknya sangat jauh.

#### 3. BNNK yang terbentuk baru 2 (dua) dari 14 kabupaten /kota yang ada

Pembentukan BNNK yang ada baru 2 (dua) berdampak signifikan pada upaya P4GN yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran sehingga BNNP Kalimantan Tengah sangat mengharapkan bantuan dari BNN RI untuk memprioritaskan percepatan pembentukan BNNK di wilayah Kalimantan Tengah.

#### 4. Belum adanya layanan rawat inap rehabilitasi

Saat ini belum terdapat fasilitas layanan rawat inap milik BNNP Kalimantan Tengah sementara banyak klien klinik Pratama yang putus program dikarenakan lokasinya yang jauh dari berbagai kabupaten/kota. Dibutuhkan fasilitas yang memadai agar klien dapat mengikuti program rehabilitasi secara berkesinambungan sampai dinyatakan bersih dari narkoba dan siap kembali produktif di masyarakat.

### *Opportunities* (Kesempatan)

#### 1. Kekuatan Media Sosial

Dunia digital dan media sosial menguat perannya terutama di masa pandemi Covid 19, informasi dan kampanye tentang narkoba dapat dilakukan tanpa harus melakukan tatap muka. Media sosial kini efektif sebagai sarana

pertukaran ide dan informasi. Penyebaran informasi berlangsung amat cepat dan hampir tanpa batas. Efektivitas media sosial tidak hanya karena jumlah penggunanya yang masif. Karakteristik media sosial sendiri juga merupakan kekuatan. Pada saat ini follower media sosial BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran sebagai berikut :

Instagram : 12.511 orang

Facebook : 4.932 orang

Twitter : 446 orang

Youtube : 1.040 orang

2. BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan hibah bangunan klinik rawat inap dari Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021

Saat ini sedang dilakukan pembangunan klinik rawat inap rehab senilai 2 milyar di BNNP Kalimantan Tengah. Pembangunan gedung ini dibiayai dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitas gedung ini akan sangat menunjang kegiatan rehabilitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Di masa mendatang, pengguna dan penyalah guna tidak perlu direhab jauh-jauh ke provinsi lain, selain itu program rehabilitasi tidak putus di tengah jalan.

#### *Threats (Ancaman)*

1. Ketidakpedulian Pemerintah Daerah pada Permasalahan Narkoba

Permasalahan narkoba belum menjadi prioritas kepala daerah di wilayah Kalimantan Tengah, hal ini dapat dilihat dari hanya dua kabupaten dan satu kota yang memiliki Perda tentang P4GN. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Ketidakpedulian para kepala daerah ini tentunya akan menyusahkan pergerakan BNNP Kalimantan Tengah. Bagaimana pun, permasalahan narkoba adalah permasalahan bangsa sehingga memerlukan sinergi dengan semua pemangku kepentingan.

Dengan daftar yang ada, maka kita mampu membuat strategi sebagai berikut:

1. Keberadaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melahirkan kepedulian kepala daerah melakukan rencana aksi P4GN.

- Kekuatan Inpres diharapkan dapat mengetuk kepedulian kepala daerah dalam berperan serta. Untuk itu prioritas BNNP Kalimantan Tengah adalah sosialisasi dan advokasi pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Idealnya, kegiatan sosialisasi dan advokasi dilaksanakan secara luring. Namun, keterbatasan anggaran BNNP Kalimantan Tengah dapat disiasati dengan melakukan virtual meeting. Kondisi pandemi merupakan alasan yang kuat untuk melaksanakan pertemuan online dibandingkan langsung ke daerah yang membutuhkan banyak biaya.
  3. Keberadaan fasilitas layanan rawat jalan klinik rehab harus segera diperlengkapi dengan sarana prasarana yang diperlukan. Begitu klinik dapat beroperasi maka dengan menggunakan kekuatan media sosial, humas BNNP Kalimantan Tengah dapat menyebarkannya sehingga pengguna dan penyalahguna dapat direhab di sini.
  4. Media sosial dan sarana digital dimanfaatkan secara optimal dalam semua kegiatan P4GN :
    - Kampanye atau sosialisasi tentang kegiatan rehabilitasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat. Melalui media sosial, BNNP Kalimantan tengah dapat mengundang masyarakat turut serta dalam kampanye narkoba yang masif. BNNP Kalimantan Tengah telah melantik duta anti narkoba provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari mahasiswa, dan berencana akan melantik duta anti narkoba dari setiap kabupaten/kota. Duta anti narkoba berperan sebagai influencer yang menjadi perpanjangan tangan BNN di lingkungannya masing-masing dalam mengkampanyekan anti narkoba.
    - Rehabilitasi secara online sangat memungkinkan apabila dibangun sistem yang terpadu dan sederhana sehingga konsultasi tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa tatap muka.
    - Bidang pemberantasan akan membuka contact center sebagai sarana pengaduan masyarakat apabila memiliki informasi mengenai peredaran narkoba di lingkungannya sehingga informasi tidak tergantung intelijen yang ditugaskan di pusat. Masyarakat dapat turut berperan aktif dalam memerangi narkoba di lingkungan sekitarnya dan memberikan informasi kepada BNNP Kalimantan Tengah melalui contact center yang telah disediakan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL**

#### **A. TUJUAN ORGANISASI**

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL**

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Mengurangi permintaan narkotika selama pandemi Covid-19.
2. Meyakinkan pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi.
3. Menangkap pengedar dan penyalahguna narkoba
4. Membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan.

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

#### **A. RENCANA KINERJA**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

#### **B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN**

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 sebesar Rp. 59.848.838.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang tersebar di 3 unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan  
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	469.000.000	391.355.000	202.000.000	222,200,000	244,420,000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	162.000.000	163.835.000	296.000.000	325,600,000	358,160,000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	611.829.000	732.664.000	692.100.000	761,310,000	837,441,000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	110.113.000	107.445.000	112.000.000	123,200,000	135,520,000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-				
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	729.893.000	293.335.000	262,520,000	288,772,000	317,649,200
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	-	-	-	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	184.486.000	406.691.000	489,745,000	538,719,500	592,591,450
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	77.851.000	19.248.000	71.100.000	78.210.000	86.031.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	100.000.000	150.000.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	914.508.000	783.098.000	750.000.000	825.000.000	907.500.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	194.930.000	268.525.000	243.205.000	267.525.500	294.278.050
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	194.930.000	268.525.000	243.205.000	267.525.500	294.278.050
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pidana narkotika dan prekursor narkotika	pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)					
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	160.279.000	59.777.000	112.298.000	123.527.800	135.880.580
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	160.279.000	59.777.000	112.298.000	123.527.800	135.880.580
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	4.569.106.000	4.255.663.000	7.665.532.000	8.431.865.200	9.275.051.720
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4.569.106.000	4.255.663.000	7.665.532.000	8.431.865.200	9.275.051.720

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Kinerja**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	1,8	1,8	1,8	1,8

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	15 orang	15 orang	20 orang	20 orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	10 orang	10 orang	15 orang	15 orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	-	-	-	-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	3	3	3	3
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3,2	3,2	3,3	3,3
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	1	1	2	3
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	8 BP	8 BP	10 BP	10 BP
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			terlarang lainnya yang dimusnahkan*)					
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	-	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)	-	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	-	99,5	99,5	99,5	99,5
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	2	2	2	2
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	94	95	95
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	2	2	2	2

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan  
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	469.000.000	391.355.000	202.000.000	262.600.000	341.380.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	162.000.000	163.835.000	296.000.000	384.800.000	500.240.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	611.829.000	732.664.000	692.100.000	899.730.000	1.169.649.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	110.113.000	107.445.000	112.000.000	145.600.000	189.280.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-				
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	729.893.000	293.335.000	262,520,000	341.276.000	443.658.800
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	-	-	-	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	184.486.000	406.691.000	489,745,000	636.668.500	827.669.050
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	77.851.000	19.248.000	71,100,000	92.430.000	120.159.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	100.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	914.508.000	783.098.000	750.000.000	975.000.000	1.267.500.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	194.930.000	268.525.000	243.205.000	316.166.500	411.016.450
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	194.930.000	268.525.000	243.205.000	316.166.500	411.016.450

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	160.279.000	59.777.000	112.298.000	145.987.400	189.783.620
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	160.279.000	59.777.000	112.298.000	145.987.400	189.783.620
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	4.569.106.000	4.255.663.000	7.665.532.000	9.964.931.600	12.954.411.080
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4.569.106.000	4.255.663.000	7.665.532.000	9.964.931.600	12.954.411.080

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

**Lampiran**  
**Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	Informasi dan edukasi melalui talkshow/tatap muka
				Informasi dan edukasi melalui kampanye/pagelaran seni
				Informasi dan edukasi melalui pemanfaatan media cetak
				Informasi dan edukasi melalui placement radio local/daerah
				Koordinasi persiapan pengembangan softskill di SMP dan SMU
				Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat
				Informasi dan edukasi media online
				Monitoring pelaksanaan informasi dan edukasi di BNNK
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Informasi dan edukasi melalui talkshow/tatap muka
				Informasi dan edukasi melalui kampanye/pagelaran seni
				Informasi dan edukasi melalui pemanfaatan media cetak
				Informasi dan edukasi melalui placement radio local/daerah
				Koordinasi persiapan pengembangan softskill di SMP dan SMU

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat
				Informasi dan edukasi media online
				Monitoring pelaksanaan informasi dan edukasi di BNNK
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba
				Fasilitasi Pelaksanaan Program ketahanan anti narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba
				Fasilitasi Pelaksanaan Program ketahanan anti narkoba
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan teknis
				Pemetaan kelompok sasaran di instansi pemerintah
				Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah
				Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah
				Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Pemetaan potensi pada kawasan rawan narkoba perkotaan/pedesaan Rapat kerja dalam rangka sinergi program pemberdayaan alternative dengan stakeholder Audiensi dengan stakeholder dalam rangka harmonisasi program pemberdayaan alternative pada kawasan rawan narkoba Bimbingan teknis lifeskill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di wilayah perkotaan/pedesaan Bimbingan teknis stakeholder dan pendamping dalam rencana aksi pemberdayaan alternative pada kawasan rawan narkoba Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan alternative pada

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				kawasan rawan narkoba perkotaan/pedesaan
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Bimbingan teknis petugas IBM Monitoring rencana aksi
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Peningkatan kompetensi teknis Verifikasi tempat uji kompetensi
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis Verifikasi tempat uji kompetensi
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Rapat kerja bidang rehabilitasi tingkat provinsi Bimbingan teknis tingkat provinsi Bimbingan teknis lembaga rehabilitasi Rapat koordinasi tingkat provinsi Operasional klinik/fasilitasi rehabilitasi Layanan rehabilitasi rawat jalan Pendampingan pemulihan Layanan SKHPN Monitoring dan evaluasi
				-
				-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	- -
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Pemetaan dan koordinasi melalui Rapat koordinasi IBM dan Pemetaan
				Pembentukan unit IBM melalui pembentukan unit IBM dan Operasional unit IBM
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Supervisi dan asistensi
				Operasional unit IBM
				Pemetaan dan koordinasi melalui Rapat koordinasi IBM dan Pemetaan
				Pembentukan unit IBM melalui pembentukan unit IBM dan Operasional unit IBM
				Supervisi dan asistensi
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	Pemetaan Informasi Jaringan Intelijen
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	Rapat kerja teknis direktorat narkoba, BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba
				Penyelidikan kasus tindak pidana narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Penyidikan kasus tindak pidana narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	- - -
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Penerimaan Barang Bukti Pengeluaran Barang Bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Perawatan kesehatan pegawai Pengawasan tahanan Administrasi tahanan TAT
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	- - - - -
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran  Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA  Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Penyusunan Laporan
12.			Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran